

PEMBANGUNAN PERTANIAN WILAYAH KEPULAUAN DI MALUKU:
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN IMPLEMENTASI DALAM KESIAPAN SDM GUNA
MENDUKUNG KEDAULATAN PANGAN

Prof. Dr. M.J. Sapteno, SH., M.Hum.

Rektor Universitas Pattimura

PEMBANGUNAN PERTANIAN DI INDONESIA

Pembangunan pertanian idefinisikan sebagai suatu proses perubahan sosial. Dibandingkan dengan keseluruhan pembangunan ekonomi di Indonesia, pembangunan pertanian tetap dianggap terpenting. Hal ini disebabkan karena:

- Potensi sumberdaya besar dan beragam;
- Pendapatan nasional cukup besar;
- Banyaknya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini; dan
- Menjadi basis pertumbuhan di pedesaan.

Syarat mutlak pembangunan pertanian menurut Mosher (1965) adalah:

- adanya pasar untuk hasil-hasil usahatani;
- teknologi tanaman yang senantiasa berkembang;
- tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal;
- adanya perangsang produksi bagi petani; dan
- tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu.

Selain syarat mutlak terdapat juga 5 syarat pelancar yaitu :

- 1) pendidikan pembangunan pertanian;
- 2) kredit produksi usahatani;
- 3) kegiatan gotong royong petani;
- 4) perbaikan dan perluasan lahan pertanian; dan
- 5) perencanaan nasional dari pembangunan pertanian.

Paradigma baru pembangunan pertanian di negara-negara berkembang adalah:

- menciptakan kebijaksanaan pertanian yang menjamin agar petani memperoleh hak mereka atas air dan bibit;
- membangun suatu pertanian yang dapat menjadi ketahanan pangan; dan
- melindungi dan memanfaatkan kekayaan alam berupa plasma nutfah.

Secara umum, pembangunan pertanian perlu merubah paradigma dari sekedar memproduksi komoditas ke peningkatan kapabilitas, cara-cara baru agar mampu menghasilkan produk yang berkarakter *the best commodity*, yaitu unggul, lebih baik, lebih bercitra, dan dengan input yang sedikit (Pakpahan dkk., 2005). Hanya dengan strategi inilah pertanian Indonesia mampu bersaing dalam pasar global.

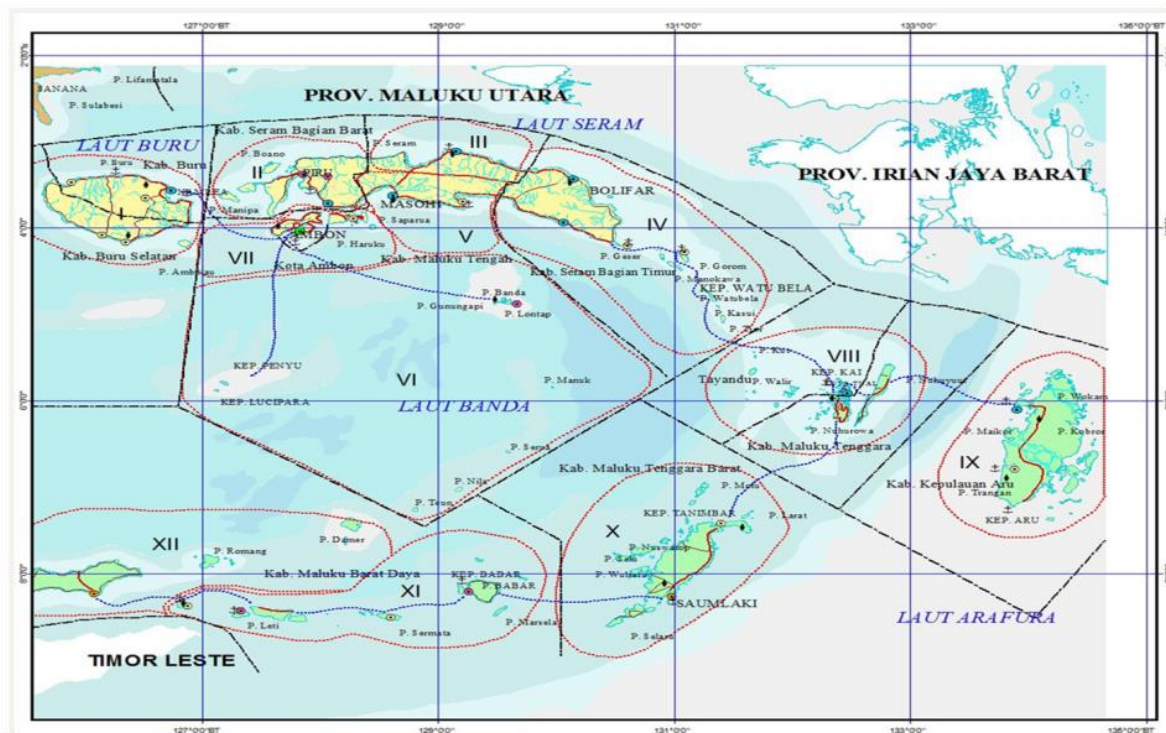
PEMBANGUNAN PERTANIAN WILAYAH KEPULAUAN MALUKU

Pendekatan pembangunan wilayah kepulauan yang diterapkan Pemerintah Provinsi Maluku untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pada pulau-pulau kecil adalah konsep gugus pulau, kawasan laut pulau dan multigate system (Ralahalu, 2005).

Konsep Gugus Pulau (GP)

Gugus Pulau adalah sekumpulan pulau-pulau yang secara geografis saling berdekatan dan memiliki keterkaitan erat dan kesalingtergantungan sosial budaya-ekonomi dan bio-fisik yang cukup kuat. Oleh karena itu, pembangunan pertanian berbasis Gugus Pulau dilakukan dengan tujuan untuk pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah sekitarnya yang lebih luas. Dalam hal ini, batas GP sebenarnya bukan didasarkan pada batas-batas administrasi pemerintahan kecamatan atau kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi Maluku tetapi lebih didasarkan kepada batas-batas kawasan potensi ekonomi.

Pendekatan Gugus Pulau merupakan peluang bagi pengembangan daerah sekaligus memperpendek rentang kendali (span of control) pembangunan di wilayah pulau-pulau kecil. Berdasarkan jarak antar pulau, kesamaan ekosistem, orientasi sosial budaya, potensi sumber daya alam, sistem perekonomian dan transportasi serta infrastruktur, maka Gugus Pulau di Provinsi Maluku dibagi dalam 12 Gugus Pulau (Titaley, 2006).



Gambar 1. Pembagian Gugus Pulau di Provinsi Maluku : I (Buru), II (Seram Bagian Barat), III (Seram Utara), IV (Seram Bagian Timur), V (Seram Bagian Selatan), VI (Banda), VII (Ambon dan PP Lease), VIII (Kepulauan Kei), IX (Kepulauan Aru), X (Tanimbar), XI (Babar), XII (Kepulauan Terselatan).

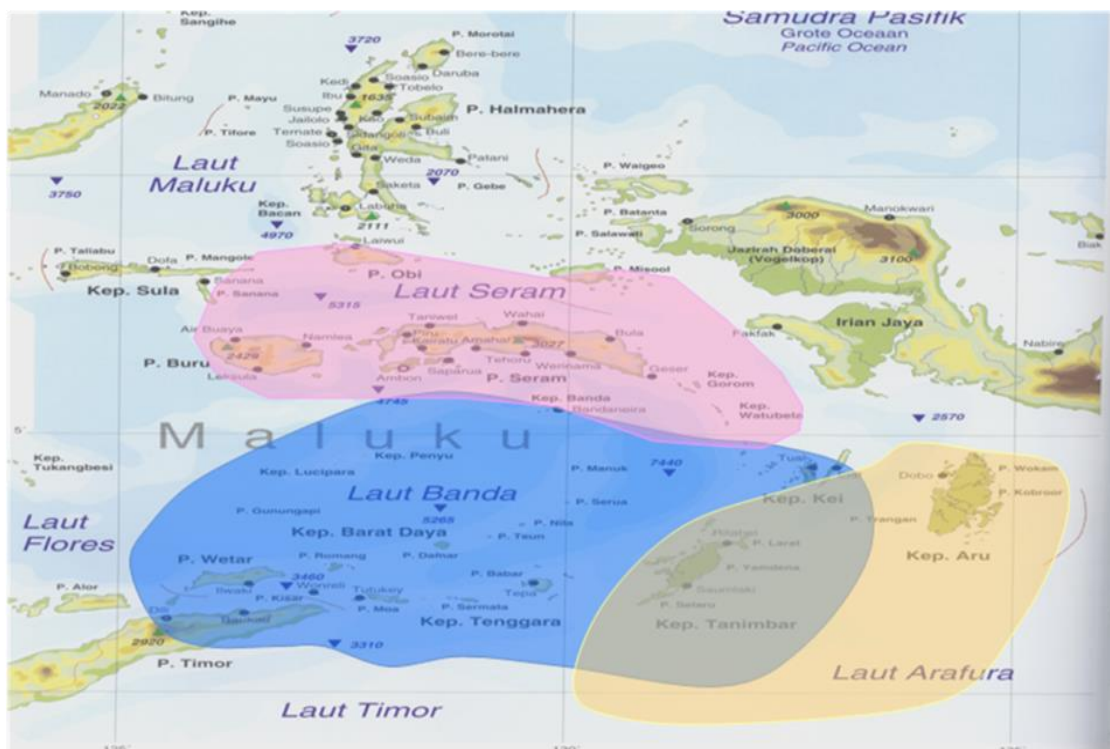
Laut Pulau (LP)

Laut Pulau (LP) merupakan sistem yang lebih besar dari GP atau GP dapat menjadi sub-sistem dari LP. Sebagai sebuah sistem, maka interaksi LP dan GP merupakan interaksi yang saling menguatkan dan fungsional. Kawasan laut pulau ini dicirikan oleh adanya simpul pertumbuhan antar pulau yang terhubung oleh laut, dan simpul ini tidak dibatasi oleh garis atau batas administrasi pemerintahan. Jumlah kawasan Laut Pulau di Provinsi Maluku dibagi atas tiga bagian, yaitu:

1. kawasan Laut Pulau Seram;
2. kawasan Laut Pulau Banda; dan
3. kawasan Laut Pulau Arafura.

Konsep pengembangan Laut Pulau ini secara makro menitik beratkan pada pandangan bahwa Kepulauan Maluku selain sebagai satu kesatuan ekonomi antar gugus di Maluku, tetapi dapat juga berarti bahwa pengembangan Propinsi Maluku tidak hanya berasal dari dalam wilayah administrasi Maluku saja tetapi juga diharapkan terkait erat dengan perkembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar Maluku (Gambar 2).

Melalui konsep pengembangan Laut Pulau ini, laut dipandang sebagai prasarana penghubung antar pulau dan merupakan wilayah potensial yang dapat dibudidayakan sebagai kawasan produksi, serta menjadikan Kepulauan Maluku sebagai satu kesatuan ekonomi dengan wilayah lain di luar Maluku. Selain itu strategi pendekatan Laut Pulau ini dapat memperpendek rentang kendali akses antar pulau, sehingga kesenjangan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah belakang dan kawasan terpencil dapat diatasi, karena kota-kota dapat berfungsi sebagai simpul jasa distribusi pemasaran, perhubungan, perdagangan, industri dan komunikasi.



Gambar 2. Kawasan Laut Pulau di Provinsi Maluku (a) Kawasan Laut Pulau Seram (Kota Ambon, Namlea, Wahai, Gebe, Sorong dan Fak Fak), (b) Kawasan Laut Banda (Kota Ambon, Tual, Saumlaki, Wonreli, Ilwaki dan Kupang, (c) Kawasan Laut Pulau Arafura (Kota Tual, Saumlaki, Dobo, Timika dan Marauke).

PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

Menurut Technical Advisory Committee of the CGIAR (TAC-CGIAR, 1988), "pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya yang berhasil untuk usaha pertanian secara berkesinambungan. Ciri-ciri pertanian berkelanjutan:

- 1) mantap secara ekologis,
- 2) dapat berlanjut secara ekonomis
- 3) adil
- 4) manusiawi dan
- 5) luwes

Perubahan yang dihadapi dalam sistem pertanian berkelanjutan yaitu:

1. membangun pemerintah yang baik dan memposisikan pertanian sebagai sektor andalan perekonomian nasional;
2. mewujudkan kemandirian pangan dalam tatanan perdagangan dunia yang bebas dan tidak adil;
3. mengurangi jumlah petani miskin,
4. meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian;
5. membangun sistem agribisnis terkoordinatif;
6. melestarikan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup;
7. membangun system IPTEK yang efisien.

Kerusakan sumber daya alam, terutama degradasi kesuburan tanah akibat eksploitasi berlebihan, akan mengancam kelangsungan produksi pertanian. Namun, jika dipelajari dari aspek yang mendasar, sumber utama kekeliruan pembangunan pertanian adalah lebih populernya model-model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan yang lebih cepat meningkatkan produksi dan pendapatan (GDP dan GNP), namun tidak disertai pemerataan dan keadilan sosial.

Melalui pertanian organik sesungguhnya terkandung keinginan untuk mandiri. Artinya, ada keinginan untuk lepas dari ketergantungan terhadap produsen berbagai input sarana produksi yang dikuasai perusahaan-perusahaan kapitalis dunia.

PERANAN FAKULTAS PERTANIAN UNPATTI DALAM MENYIAPKAN SDM DI MALUKU

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan pertanian adalah:

- Lemahnya kualitas SDM pertanian, termasuk di dalamnya subsektor peternakan dan perikanan;
- Masalah permodalan usaha di sektor pertanian; dan
- Dukungan pemerintah melalui alokasi anggaran belanja negara dan daerah untuk sektor pertanian.

Data BPS bulan Agustus, 2013 menunjukkan bahwa kualitas SDM sektor pertanian berada pada posisi paling rendah dibandingkan sektor lain (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Tingkat Pendidikan SDM Sektor-sektor Perekonomian Indonesia, 2013
(dalam Persen)

Sektor	< SD	SMP	SMA	SMK	Dipl.	Univ.
Pertanian	73,9	15,7	7,1	2,5	0,3	0,5
Pertambangan	52,7	17,3	15,7	8,6	2,2	3,7
Industri	38,4	23,7	18,7	14,8	1,5	2,9
Listrik, Gas, Air	12,7	16,8	28,5	26,8	6,3	10,9
Bangunan	51,6	24,5	11,7	8,4	0,9	2,9
Perdagangan Hotel dan Restoran	39,1	21,2	22,2	11,4	2,4	3,7
Transportasi dan Komunikasi	38,7	23,1	20	11,2	2,8	4,2
Jasa Keuangan	8,7	9,5	28,2	16,1	9,8	27,7
Jasa lain-lain	21,4	12,8	21,2	10,7	9	24,9
Total	48,6	18,3	15,6	8,6	2,7	6,2

Sumber: BPS, Sakernas, Agustus 2013

Pembangunan pertanian selain bertujuan mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan, juga harus mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang akan menunjang sistem tersebut. Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah mengambil kebijakan penting untuk mengcover kebutuhan Penyuluh Pertanian tersebut seperti yang telah diamanatkan UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dengan mengeluarkan kebijakan satu desa satu penyuluh. Berdasarkan data Departemen Dalam Negeri (Depdagri), tahun 2009 terdapat 74.683 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia dan saat ini baru terdapat sekitar 27.922 Penyuluh Pertanian PNS, sehingga untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Kementan RI masih kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian sebanyak 46.761 orang.

Jumlah kebutuhan tenaga penyuluh Pertanian di Provinsi Maluku sebanyak 734 orang dan jika angka ini dioptimalkan maka target Maluku dalam penanggulangan kemiskinan di Maluku bisa berhasil dengan baik. Tahun 2014, jumlah penyuluh Pertanian di Maluku sebanyak 543 orang terdiri dari PNS 349 orang, THL-TBPP 192 orang dan Penyuluh Swadaya 2 orang.

Selain sebagai tenaga penyuluh, walaupun belum semua kabuapten kota terdata dengan baik, data yang telah berhasil dihimpun sebagai berikut Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 568 orang, SBB sebanyak 115 orang, SBT sebanyak 475 orang, Buru 100 orang sehingga total mencapai 1258 orang yang tersebar di berbagai perkebunan seperti Perkebunan Pala sebanyak 138 orang, perkebunan sawit sebanyak 485 orang, perkebunan kakao sebanyak 110 orang dan lain-lain sebanyak 525 orang, diperkirakan lebih dari 60% alumni Fakultas Pertanian Unpatti terserap di bidang swasta dan sisanya di instansi pemerintah. Yang perlu diantisipasi adalah di tahun 2017 kurang lebih sebanyak 13.464 orang yang bekerja di Departemen Pertanian akan memasuki masa pensiun, sehingga diperlukan lebih banyak alumni untuk mengisi kekosongan yang ada.

Fakultas Pertanian Unpatti memiliki 5 Program Studi yaitu Program Studi Agroekoteknologi, kehutanan, Peternakan, Agribisnis dan Teknologi Hasil Pertanian. Setiap Program studi menghasilkan kurang lebih 20-40 orang sarjana baru setiap tahun. Selain 5 Prodi tersebut, di tahun 2017 ada rencana membuka lagi 4 program studi baru yaitu Program studi Tanah, Perlindungan Tanaman, Penyuluhan dan Pemuliaan Tanaman. Fakultas Pertanian memiliki 2 Program Studi Pascasarjana yaitu Pengelolaan Lahan dan Manajemen Hutan.

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN PERTANIAN WILAYAH KEPULAUAN

Pembangunan pertanian di pulau-pulau kecil memiliki perbedaan pendekatan dengan yang dilakukan di pulau besar. Ruang dan jenis bahan pertanian merupakan faktor kendala utama pembangunan di pulau kecil. Etika membangun ekonomi yang didalamnya adalah pembangunan pertanian di pulau kecil bertumpu pada tiga tujuan berikut:

- 1) Menjaga dan memelihara fungsi ekologi;
 - 2) Menjaga keseimbangan dan stabilitas ekosistem;
 - 3) Mengutamakan keberlanjutan sumber daya alam; dan
 - 4) Membangun pulau kecil sebagai suatu gugusan pulau keci yang saling bergantung dan berhubungan (Nikijuluw dan Bengen, 2013).
-
- 1) Perguruan tinggi diharapkan terus berupaya dalam mengembangkan konsep baru pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis kepulauan seperti Mixed Farming Systems, Crop-Livestock Production Systems, Sistem Peternakan Sapi dibawah Perkebunan Kelapa, Agrosilvipastura, Agroforestry, Organic Farming.
 - 2) Semua pihak perlu bekerjasama dalam membangun basis data dan informasi yang real time dan up to date perlu dibangun untuk mempermudah perencanaan pembangunan pertanian yang lebih akurat.
 - 3) Komoditas sumber pangan lokal seperti sagu, ubikayu, ubi jalar, Uwi, sukun, dan pisang sebagai sumber pangan lokal perlu terus dieksplorasi melalui kegiatan penelitian.
 - 4) Komoditas bahan pangan lokal tersebut dapat menghasilkan beras non padi, tepung lokal yang dapat bersaing dengan beras dan terigu.
 - 5) Inovasi dalam menghasilkan produk pangan asal hewan yang sudah ada juga perlu didiseminasi dan dikembangkan ditingkat petani.

Implementasi strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung kedaulatan pangan di wilayah kepulauan yaitu:

- 1) Perlu dibangun konektivitas antar pulau yang handal.
- 2) Mengembangkan komoditas yang sesuai, untuk mewujudkan gugus pulau mandiri pangan yang berbasis agroekologi dan kearifan lokal;
- 3) Perlu dipersiapkan instrumen model kedaulatan pangan wilayah kepulauan.
- 4) Perguruan tinggi diharapkan terus berupaya dalam mengembangkan konsep baru pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis kepulauan seperti Mixed Farming Systems, Crop-Livestock Production Systems, Sistem Peternakan Sapi dibawah Perkebunan Kelapa, Agrosilvipastura, Agroforestry, Organic Farming,“

Revitalisasi pembangunan pertanian terfokus kepada tujuh komponen utama yakni lahan, benih, infrastruktur, tenaga kerja, modal, kelembagaan, teknologi dan industri hilir. Ke-7 komponen revitalisasi bertujuan untuk mencapai 5 sasaran penting yakni peningkatan produksi dan keberlanjutan swasembada pangan, ketahanan pangan dan nutrisi, meningkatkan daya saing dan nilai tambah, meningkatkan pendapatan petani, serta konservasi lingkungan dan adaptasi perubahan iklim (Suswono, 2011).

Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditegaskan bahwa profesi petani mendapatkan jaminan perlindungan dari negara terkait kegiatan pengolahan tanah dengan tujuan menumbuhkan dan memelihara tanaman yang pada akhirnya akan menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Harus disadari pula bahwa target peningkatan jumlah petani berada pada petani pemula dari angkatan kerja usia muda. Di antara para kaum muda terlihat ada pergeseran minat bekerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa karena rendahnya ekspektasi mereka terhadap besaran penghasilan petani serta resiko kontinuitas yang rentan dari sisi jumlah secara moneter.

KEDAULATAN PANGAN

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki sumber daya alam serta sumber pangan yang beragam, Indonesia sebetulnya harus mampu memenuhi kebutuhannya secara berdaulat dan mandiri. Keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Indonesia dalam membangun kemandirian dan kedaulatan pangan, dicirikan oleh: 1) negara tropis dengan intensitas cahaya matahari yang sangat kondusif bagi produksi pertanian; 2) lahan dan air bukan faktor pembatas; 3) sumberdaya hayati disertai keanekaragaman pangan lokal; dan 4) teknologi produksi pangan (Kementerian Pertanian, 2013).

Untuk mencapai kedaulatan pangan, kita memerlukan kemandirian pangan, dalam arti adanya kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, bermutu baik, aman, dan halal, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal (Angkasa, 2013). Pada Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014, pemerintah menetapkan visinya sebagai berikut: "Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumber daya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani" (Swastika, 2011).

Arah kebijakan politik untuk mendukung kedaulatan pangan (LPIKP, 2015):

- Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Kesejahteraan Petani
- Restrukturisasi Kelembagaan Pertanian
- Reformasi Kebijakan Diversifikasi Pangan
- Penguatan Sarana Penunjang dan Koordinasi Tata Kelola Kelembagaan